

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA 2022

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Nusa Tenggara Timur

PERIODE 30 JUNI 2022

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan per 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 7.840.511,00**.

Realisasi Belanja Negara pada per 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp8.081.800.255,-** atau mencapai 32,00 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp25.422.197.000,-**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 30 Juni 2022. Nilai Aset per per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp71.680.070.601,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp156.613.297,-**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 71.487.718.233,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp35.739.071,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp1.371.902.287,00** dan **Rp70.308.168.314,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp 4.186.852,00** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp9.583.181.558,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp9.578.994.706,00)**. Surplus dari kegiatan Non Operasional senilai **(Rp 4.123.456,00)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp 9.574.871.250,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah senilai **Rp 69.324.431.987,00** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp9.578.994.706,00)** kemudian ditambah dengan Koreksi Atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan lain-lain masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp0,00 dikurangi Transaksi Antar Entitas senilai **Rp10.558.607.581,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal per 30 Juni 2022 adalah senilai **Rp70.308.168.314,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal per 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7.840.511	0	41.402.261
JUMLAH PENDAPATAN		-	7.840.511	0	41.402.261
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	9.977.541.000	4.791.476.705	48	5.359.532.435
Belanja Barang	B.4	6.567.410.000	2.819.586.950	43	2.721.414.990
Belanja Modal	B.5	8.877.246.000	470.736.600	5	173.332.500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		25.422.197.000	8.081.800.255	32	8.254.279.925

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
NERACA
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	80.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	51.891.500	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	469.797	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Bagian lancar TGR (netto)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	24.252.000	16.769.950
Jumlah Aset Lancar		156.613.297	16.769.950
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	51.308.798.800	49.122.225.800
Peralatan dan Mesin	C.15	11.133.119.372	10.706.259.372
Gedung dan Bangunan	C.16	21.367.817.531	20.990.840.531
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	96.656.391	96.656.391
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	2.191.491.435	2.147.614.835
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	- 14.610.165.296	- 13.793.340.285
Jumlah Aset Tetap		71.487.718.233	69.270.256.644
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	1.358.273.149	1.358.273.149
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	- 1.322.534.078	- 1.320.867.760
Jumlah Aset Lainnya		35.739.071	37.405.389
JUMLAH ASET		71.680.070.601	69.324.431.983
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	80.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1.284.597.437	-
Utang yang belum ditagihkan	C.26	7.304.850	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.371.902.287	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1.371.902.287	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	70.308.168.314	73.153.964.408
JUMLAH EKUITAS		70.308.168.314	73.153.964.408
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		71.680.070.601	73.153.964.408

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	cat	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.186.852	3.484.138
JUMLAH PENDAPATAN		4.186.852	3.484.138
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.024.182.642	5.359.532.435
Beban Persediaan	D.3	55.680.450	82.019.900
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.651.662.050	1.553.222.883
Beban Pemeliharaan	D.5	483.534.000	640.555.748
Beban Perjalanan Dinas	D.6	628.533.250	442.929.759
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	739.589.166	1.007.499.184
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		9.583.181.558	9.085.759.909
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.578.994.706)	(9.082.275.771)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	4.123.456	-
Pendapatan pelepasan aset non lancar		4.123.456	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/DEFISIT dari kegiatan non operasional lainnya		4.123.456	37.918.123
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	37.918.123
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.123.456	37.918.123
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.574.871.250)	(9.044.357.648)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.574.871.250)	(9.044.357.648)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR per 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	69.324.431.983	75.726.693.906
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.574.871.250)	(9.044.357.648)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(899.397.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		-	(899.397.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.558.607.581	8.531.800.249
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	983.736.331	(1.411.954.399)
EKUITAS AKHIR	E.6	70.308.168.314	74.314.739.507

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT didirikan dengan tujuan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen dengan visi “ Masyarakat Nusa Tenggara Timur memperoleh kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi aparatur hukum dan hak asasi manusia.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pendekatan **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur . Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi asset tetap, persediaan, dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan **basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

*Pendapatan
-LRA*

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan (2) **Pendapatan- LO**

-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) **Belanja**

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan *Angsuran* (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat *berdasarkan* hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2021, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jarinan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatannya. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek

penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2021, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2021 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. **Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Piutang
Jangka
Panjang*

**Aset
Lainnya**

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT telah mengadakan revisi pada kelompok akun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, adanya penambahan jumlah pegawai, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP	0	0
	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9.977.541.000	9.977.541.000
Belanja Barang	5.980.610.000	6.567.410.000
Belanja Modal	8.877.246.000	8.877.246.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	24.835.397.000	25.422.197.000

Realisasi **B.1 PENDAPATAN**

Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp7.840.511,00**. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berasal dari beberapa sumber antara lain : Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022

Kode Akun	Uraian	2022	
		Anggaran	Realisasi
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	4.123.456
425131	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	3.717.055
Jumlah		-	7.840.511

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022 mengalami Penurunan sebesar 81 % dibandingkan realisasi periode Juni TA 2021. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 tidak terdapat Penerimaan Kembali belanja TA yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022 dan 2021

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
425131	Pendapatan sewa tnh, gedung & bangunan	3.717.055	3.484.138	94
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.123.456	-	-
425911	Penerimaan kembali belanja Pegawai TA yg lalu	-	206	#DIV/0!
425912	Penerimaan kembali belanja Barang TA yg lalu	-	5.465.000	#DIV/0!
425913	Penerimaan kembali belanja Modal TA yg lalu	-	32.452.917	#DIV/0!
Jumlah		7.840.511	41.402.261	(81)

Realisasi **B.2. BELANJA**

Belanja

Negara

Rp17.340.3

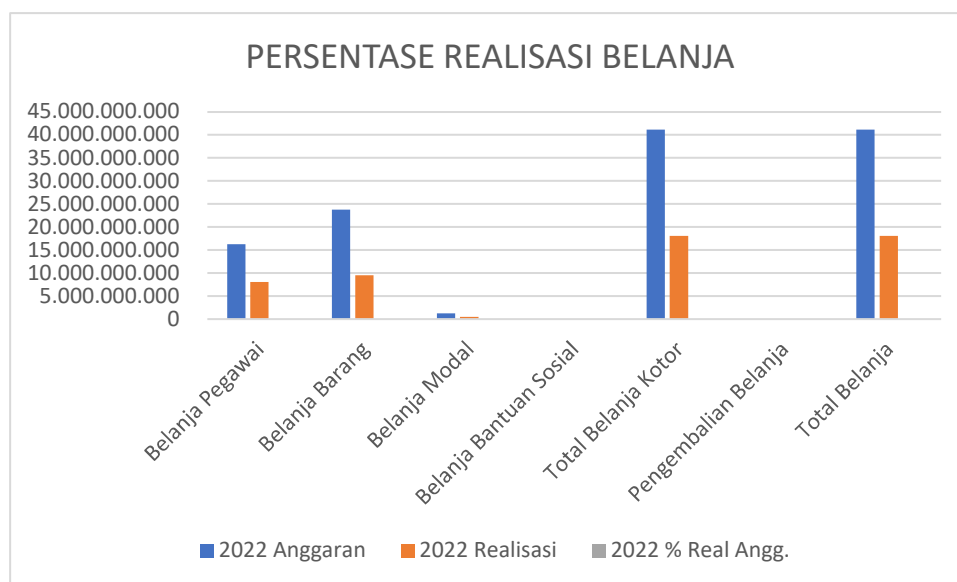
96.745,00

Realisasi Belanja pada per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp **Rp17.340.396.745,00** atau 32,00% dari anggaran belanja sebesar **Rp25.422.197.000,00** Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.977.541.000	4.791.476.705	48
Belanja Barang	6.567.410.000	2.819.586.950	43
Belanja Modal	8.877.246.000	470.736.600	5
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	25.422.197.000	8.081.800.255	32
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	25.422.197.000	8.081.800.255	32

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Belanja **B.3 Belanja Pegawai**

Pegawai

Rp8.064.60

4.052,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.064.604.052,00 dan Rp8.676.339.161,00

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 7% dari realisasi belanja periode Juni TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pejabat struktural yang kosong, dan pegawai yang pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja gaji Pokok PNS	5.707.574.500	6.134.389.880	(6,96)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	117.452	137.604	(14,64)
Belanja Tunj. Suami/isteri PNS	295.179.320	322.301.746	(8,42)
Belanja Tunj. Anak PNS	88.929.616	99.006.773	(10,18)
Belanja Tunj. Struktural PNS	164.040.000	194.770.000	(15,78)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	172.590.000	200.848.200	100,00
Belanja Tunj. PPh PNS	1.365.746	1.638.344	(16,64)
Belanja Tunj. Beras PNS	324.876.120	369.124.740	(11,99)
Belanja Uang makan PNS	992.229.000	1.010.567.000	(1,81)
Belanja Tunj Umum PNS	251.960.000	292.110.000	(13,74)
Belanja Uang Lembur	65.743.000	53.100.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	8.064.604.754	8.677.994.287	(7,07)
Pengembalian Belanja Pegawai	702	1.655.126	(99,96)
Jumlah Belanja	8.064.604.052	8.676.339.161	(7,05)

Belanja **B.4 Belanja Barang**

Barang
Rp9.516.6
40.941,00

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.516.640.941,00 dan Rp6.680.313.424,00 Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,91% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.887.358.402	1.269.776.341	48,64
Belanja Barang Non Operasional	2.459.560.313	1.480.601.788	66,12
Belanja Jasa	1.079.687.025	934.458.804	15,54
Belanja Pemeliharaan	1.183.026.489	1.220.918.926	(3,10)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.583.270.112	1.360.238.065	89,91
Belanja Persediaan	323.738.600	314.319.500	3,00
Jumlah Belanja Kotor	9.516.640.941	6.580.313.424	44,62
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	9.516.640.941	6.580.313.424	44,62

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satuan Kerja Imigrasi Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengalokasikan belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp225.413.975,00 dan mengalami kenaikan 15% dari anggaran tahun yang lalu sebesar Rp195.238.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian Akun	2022	2021	Naik/Turun (%)
521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	166.090.975	104.572.550	59
521241	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	1.421.000	-	-
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	57.902.000	78.165.800	- 26
521841	Belanja Barang Persediaan -Penanganan Pandemi COVID-19	-	12.500.000	- 100
523114	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Total		225.413.975	195.238.350	15

Belanja

B.5 Belanja Modal

Modal

Rp476.977

.980,00

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp476.977.980,00 Dan Rp718.510.750,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp476.977.980,00 mengalami penurunan sebesar 46,65 persen bila dibandingkan dengan Periode Juni TA 2021 yaitu sebesar Rp395.505.750,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.977.980	395.505.750	20,60
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin			0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin			0,00
Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	476.977.980	395.505.750	20,60
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	476.977.980	395.505.750	20,60

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan C.1 Persediaan

Rp2.422.406.156,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.422.406.156,00 dan Rp2.008.992.138,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp 413.414.018,00.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021

Persediaan	TH 2022	TH 2021	Kenaikan /Penurunan (%)
Barang Konsumsi	2.368.324.056	1.978.050.138	19,73
Barang untuk Pemeliharaan	30.418.000	30.942.000	-1,69
Pita cukai, materai & Leges	-	-	
Suku Cadang	-	-	
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	
Bahan Baku	22.945.100	-	
Persediaan Lainnya	719.000	-	
Jumlah	2.422.406.156	2.008.992.138	17,07

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp29.123.132.000,00

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Satker Keimigrasian per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 29.123.132.000,00 dan Rp29.123.132.000,00 .

Rincian nilai Tanah berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

No	Unit Pelaporan BMN	30 Juni 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Kanim Kupang	22.440.866.000	22.440.866.000	-
2	Divisi Imigrasi	0	0	-
3	Kanim Atambua	3.262.028.000	3.262.028.000	-
4	Kanim Maumere	2.205.481.000	2.205.481.000	-
5	Rudenim Kupang	0	0	-
6	Kanim Labuan Bajo	1.214.757.000	1.214.757.000	-
	Jumlah	29.123.132.000	29.123.132.000	-

1) Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.076.333.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp29.076.333.000,00 mutasi tambah Rp.0,00 dan mutasi kurang Rp0,00.

Rincian Mutasi Tanah tersebut meliputi :

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 01 Januari 2022	29.123.132.000
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
B. Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Hibah Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	29.123.132.000
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	29.123.132.000

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutase kurang Tanah tahun 2022.

C.3 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan Mesin
Rp50.539.93
7.000,00*

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp50.539.937.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 3.246 Unit dengan nilai sebesar Rp49.781.041.284,00, mutasi tambah sejumlah 119 dengan nilai sebesar Rp 794.905.980,00, dan mutasi kurang sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.410.907.018,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 17 unit dengan nilai sebesar Rp2.410.907.018,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar

2) Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.174.250.865,00 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 69 unit dengan nilai sebesar Rp9.174.250.865,00 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 72.325.264,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 10 dengan nilai sebesar Rp72.325.264,00, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

4) Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 47.464.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 17 dengan nilai sebesar Rp47.464.000,00 mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

5) Alat Kantor & Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar 7.685.452.532,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2.025 dengan nilai sebesar Rp7.477.329.552,00 mutasi tambah jumlah barang 48 dengan nilai sebesar Rp 208.122.980,00 , dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
101	Pembelian	174.222.980,00
102	Transfer Masuk	33.900.000,00

Mutasi Kurang Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
401	Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00

6) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 2.062.008.522,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 222 Unit dengan nilai sebesar Rp2.062.008.522,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp346.469.870,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 80 unit dengan nilai sebesar Rp208.969.870,00 mutasi tambah jumlah barang 50 unit dengan nilai sebesar Rp.137.500.000,00 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
101	Pembelian	137.500.000,00

8) Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp206.086.000,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 mutasi tambah jumlah barang 9 unit dengan nilai sebesar Rp206.086.000,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
101	Pembelian	206.086.000,00

9) Alat Persenjataan

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp69.487.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 40 unit dengan nilai sebesar Rp69.487.000,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

10)Komputer

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp28.422.996.193,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 870 unit dengan nilai sebesar Rp28.179.799.193,00 mutasi tambah jumlah barang 12 unit dengan nilai sebesar Rp243.197.000,00 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
101	Pembelian	243.197.000,00

11)Alat Keselamatan Kerja

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 23.100.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 12 unit dengan nilai sebesar Rp 23.100.000, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

12)Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 55.400.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar Rp 55.400.000,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

13) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Kuant.	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
32111	Peralatan dan Mesin	246	51.418.437.514	45.741.744.675	5.676.692.839
301	Alat Besar	26	2.572.539.018	1.874.189.744	698.349.274
302	Alat Angkutan	99	9.855.109.115	7.648.030.457	2.207.078.658
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10	72.325.264	71.669.164	656.100
304	Alat Pertanian	17	47.464.000	45.764.875	1.699.125
305	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.073	7.685.452.532	6.409.372.479	1.276.080.053
306	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	222	2.062.008.522	1.875.347.955	186.660.567
307	Alat Kedokteran	130	346.469.870	167.397.460	179.072.410
308	Alat Laboratorium	9	206.086.000	12.880.374	193.205.626
309	Alat Persenjataan	40	69.487.000	69.487.000	0
310	Komputer	882	28.422.996.193	27.489.105.167	933.891.026
311	Alat Eksplorasi	0	0	0	0
312	Alat Pengeboran	0	0	0	0
313	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0	0	0
314	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	0
315	Alat Keselamatan Kerja	12	23.100.000	23.100.000	0
316	Alat Peraga	0	0	0	0
317	Peralatan Proses Produksi	0	0	0	0
318	Rambu-Rambu	0	0	0	0
319	Peralatan Olahraga	5	55.400.000	55.400.000	0

Gedung dan Bangunan C.4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp39.784.122.633,00
2.633,00

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 39.784.122.633,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 95 unit dengan nilai sebesar Rp39.459.755.912,00, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp583.083.721,00 dan mutasi kurang sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar

Rp258.717.000,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Wilayah ialah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar sebesar Rp 38.184.937.888,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 91 unit dengan nilai sebesar Rp37.860.571.167,00, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 583.083.721,00, dan mutasi kurang jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp258.717.000,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
208	Pengembangan Melalui KDP	583.083.721,00

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
401	Penghentian Aset dari Penggunaan	258.717.000

2) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.599.184.745,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai sebesar Rp 1.599.184.745,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

3) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Qty	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
133111	Gedung dan Bangunan	92	39.784.122.633	5.574.932.681	34.209.189.952
318	Rambu-Rambu	0	0	0	0
401	Bangunan Gedung	88	38.184.937.888	5.478.927.371	32.706.010.517
402	Monumen	0	0	0	0
403	Bangunan Menara	0	0	0	0
404	Tugu/Titik Kontrol/Pasti	4	1.599.184.745	96.005.310	1.503.179.435

C.5. Aset Tetap Lainnya.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp33.749.162,00*

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 33.749.162,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 259 unit dengan nilai sebesar Rp33.749.162,00, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 33.749.162,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 259 unit dengan nilai sebesar Rp33.749.162,00 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP)*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp583.083.721,00, mutasi tambah sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebesar Rp583.083.721,00.

*Rp583.083.7
21,00*

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjan (KDP) tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
502	Perolehan/Penambahan KDP	0,00
503	Pengembangan KDP	0,00

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjan (KDP) tersebut meliputi:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Gabungan (Rp)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang jadi	583.083.721

*Aset Lainnya
Rp49.419.13
9,00 ,00*

C.7. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 49.419.139,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp149 dengan nilai sebesar Rp 49.419.139,00, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

*Aset Tak
Berwujud
Rp49.419.13
9,00*

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 49.419.139,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp149 dengan nilai sebesar Rp 49.419.139,00, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Aset Tak Berwujud yaitu sebagai berikut :

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
162151	Software	49.419.139	0	49.419.139
162161	Lisensi	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kode	Uraian	Kuant.	Nilai	Amortisasi	Nilai Buku
162151	Software	149	49.419.139	49.419.139	0
162161	Lisensi	0	0	0	0

C.9. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam operasi

Aset Tetap yang tidak digunakan Rp3.593.164.527,00

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.593.164.527,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 916 dengan nilai sebesar Rp3.593.164.527,00, mutasi tambah sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp 258.717.000,00 , dan mutasi kurang sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp 258.717.000,00.

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2022 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	3.439.476.345	39.626.717
3.	Gedung dan Bangunan	140.601.000	0
4.	Jalan,Jembatan,Irigasidan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	13.087.182	0
6.	Aset Tak Berwujud	0	0
JUMLAH		3.593.164.527	39.626.717

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Kode	Uraian	Kuant	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.125	3.632.79 1.244	3.520.182.195	112.609.049
166112	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	149	49.419.1 39	49.419.139	0

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Intrakomptable		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.422.406.156	1,96	0	0,00	2.422.406.156	1,96
	Sub Jumlah (1)	2.422.406.156	1,96	0		2.422.406.156	1,96
II	Aset Tetap						
1	Tanah	29.123.132.000	23,59	0	0,00	29.123.132.000	23,57
2	Peralatan dan Mesin	50.503.926.736	40,90	36.010.264	47,61	50.539.937.000	40,91
3	Gedung dan Bangunan	37.784.122.633	30,60	0	0,00	37.784.122.633	30,58
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	33.749.162	0,03	0	0,00	33.749.162	0,03
6	KDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (2)	117.444.930.531	95,12	36.010.264	47,61	117.480.940.795	95,09
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud	49.419.139	0,04	0	0,00	49.419.139	0,04
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan ops pem	3.553.537.810	2,88	39.626.717	52,39	3.593.164.527	2,91
	Sub Jumlah (3)	3.602.956.949	2,92	39.626.717	52,39	3.642.583.666	2,95
	Total	123.470.293.636	100	75.636.981	100	123.545.930.617	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	44.874.374.586	83,13	24.879.839	38,57	44.899.254.425	83,08
2	Gedung dan Bangunan	5.574.932.681	10,33	0	0,00	5.574.932.681	10,32
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (1)	50.449.307.267	93,46	24.879.839	38,57	50.474.187.106	93,39
II	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud	49.419.139	0,09	0	0,00	49.419.139	0,09
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan ops pem	3.480.555.478	6,45	39.626.717	61,43	3.520.182.195	6,51
	Sub Jumlah (2)	3.529.974.617	6,54	39.626.717	61,43	3.569.601.334	6,61
	Total	53.979.281.884	100,00	64.506.556	100,00	54.043.788.440	100,00

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	2.422.406.156	2.422.406.156	0
2	Tanah	50.539.937.000	50.539.937.000	0
3	Peralatan dan Mesin	49.745.031.020	49.745.031.020	0
4	Gedung dan Bangunan	39.784.122.633	39.784.122.633	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	33.749.162	33.749.162	0
7	KDP	0	0	0
8	Aset Tak Berwujud	49.419.139	49.419.139	0
9	Aset Lain-lain	3.593.164.527	3.593.164.527	0
	Total	146.167.829.637	146.167.829.637	0

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah

(Rp50.449.307.267,00) masing-masing (Rp50.449.307.267,00) dan (Rp47.870.587751,00) Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per per 30 Juni 2022.

No	Uraian Neraca	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.874.374.586
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.574.932.681
Total		50.449.307.267

Hutang Kepada Pihak Ketiga Rp2.169.214.030,00

C.11. Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang kepada Pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Hutang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.169.214.030,00 dan Rp50.574.201,00.

Hutang yang belum ditagihkan Rp563.068.020,00

C.12. Hutang Yang Belum Ditagihkan

Hutang yang belum ditagihkan merupakan sejumlah Belanja Bendahara Pengeluaran yang sudah dikuitansikan atau dibayarkan namun belum ditagihkan kepada BUN. Hutang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp563.068.020,00 dan Rp0,00. Ini terjadi karena adanya perubahan penggunaan Aplikasi SAKTI dengan single entry, sehingga setiap kwitansi/BAST yang telah direkap di Modul Komitmen pada bulan Juni 2022 tetapi SP2D bulan berikutnya sehingga membentuk saldo hutang yang belum ditagihkan.

Uang Muka dari KPPN Rp750.000.000,00

C.13. Uang Muka Dari KPPN

Uang muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Uang muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-

masing sebesar Rp750.000.000,00 dan Rp648.000.000,00. Adapun Rincian UP masing-masing satuan kerja sebagai berikut :

No	Kode Satker	Satker	Jumlah UP
1	408231	Kantor Imigrasi Kelas I Kupang	180.000.000
2	409114	Kantor Imigrasi Kelas II Atambua	124.000.000
3	409123	Kantor Imigrasi Kelas II Maumere	171.000.000
4	664696	RUDEMIM Kupang	80.000.000
5	683547	Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo	125.000.000
6	408884	Divisi Imigrasi	70.000.000
Jumlah			750.000.000

*Utang
Jangka
Pendek
lainnya
Rp8.900,00*

C.14. Hutang jangka pendek lainnya

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Hutang jangka pendek lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.900,00 dan Rp0,00. Ini merupakan pajak atas jasa servis printer sebesar Rp5.000,00 dan jasa servis mobil sebesar Rp3.900,00 yang akan disetor ke kas Negara pada periode Juli 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas II Atambua.

C.15. Ekuitas

*Ekuitas
Rp72.336.20
2.355,00*

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp72.336.202.355,00 dan Rp73.204.538.609,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan dari surat keterangan, visa dan paspor serta pendapatan dari anggaran lain-lain. Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.702.678.356,00 dan Rp5.575.496,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rp4.702.678.

356,00

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dr pemindahtanganan BMN	-	-	0,00
Pendapstsn dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan sewa tnh, gedung & bangunan	8.183.776	8.362.782	-2,14
Pendapatan surat ket, visa & paspor	4.684.250.000	-	0,00
Pendapatan denda keterlambatan peny.ppek pem	10.244.580	-	0,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Banguna	-	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	0,00
Penerimaan kembali belanja peg TA yg lalu	-	-	0,00
Penerimaan kembali belanja Modal TA yg lalu	-	-	0,00
Penerimaan kembali belanja brg TA yg lalu	-	-	0,00
Pendapatan anggaran Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	4.702.678.356	8.362.782	56133,42

Beban

D.2 Beban Pegawai

Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada

Rp10.041.564

.722,00

per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.041.564.722,00 dan Rp8.654.466.161,00

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban gaji Pokok PNS	7.335.074.620	6.134.389.880	19,57
Beban Pembulatan Gaji PNS	152.619	137.604	10,91
Beban Tunj. Suami/isteri PNS	381.770.590	322.301.746	18,45
Beban Tunj. Anak PNS	115.132.592	99.006.773	16,29
Beban Tunj. Struktural PNS	212.080.000	194.770.000	8,89
Beban Tunj. Fungsional PNS	222.210.000	200.848.200	10,64
Beban Tunj. PPh PNS	2.563.583	1.638.344	56,47
Beban Tunj. Beras PNS	420.108.420	369.124.740	13,81
Beban Uang makan PNS	942.583.000	988.694.000	(4,66)
Beban Tunj Umum PNS	325.550.000	292.110.000	11,45
Beban Uang Lembur	84.340.000	53.100.000	-
Jumlah Belanja Kotor	10.041.565.424	8.656.121.287	16,01
Pengembalian Belanja Pegawai	702	1.655.126	-
Jumlah Belanja	10.041.564.722	8.654.466.161	16,03

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Rp825.275.922,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp825.275.922,00 dan Rp416.674.201,00 Rincian Beban Persediaan untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	823.557.282	416.674.201	97,65
Beban Persediaan Pita Cukai, materai dan leges		0	-
Belanja Barang persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Persediaan bahan baku	1.718.640	0	
Bahan untuk Pemeliharaan		0	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	825.275.922	416.674.201	98,06

**Beban
Barang dan
Jasa
Rp5.613.544.
399,00**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.613.544.399,00 dan Rp3.686.436.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Langanan Daya dan Jasa	0	0	0,00
Beban Langanan Listrik	304.581.604	237.300.381	28,35
Beban Langanan Telepon	18.444.146	20.045.043	-7,99
Beban Jasa Pos dan Giro			0,00
Beban Sewa	668.680.800	571.150.005	17,08
Beban Jasa Profesi	9.100.000	6.700.000	35,82
Beban Keperluan Perkantoran	1.512.898.148	871.093.377	73,68
Beban Penambah daya Tahan Tubuh	93.349.200	6.080.000	1435,35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.152.074	13.202.995	-23,11
Beban Honor Operasional satuan Kerja	215.300.000	222.030.000	-3,03
Beban Barang Operasional Lainnya	25.803.464	52.797.419	-51,13
Beban Bahan	816.746.661	673.634.017	21,24
Beban Honor Output Kegiatan	83.940.000	71.910.000	16,73
Beban Barang Non Operasional lainnya	1.604.598.352	735.057.771	118,30
Beban Air	8.735.975	10.557.575	-17,25
Beban Jasa lainnya	15.800.000	10.540.000	49,91
Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan Mesin	0	1.600.000	-100,00
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi COVID-19	166.090.975	104.572.550	58,83
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-	1.421.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	57.902.000	78.165.800	-25,92
pengembalian beban barang dan jasa	0	0	0,00
Jumlah	5.613.544.399	3.686.436.933	52,28

**Beban
Pemeliharaan
Rp1.182.042.
119,00**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.182.042.119,00 dan Rp1.206.306.041,00. Rincian beban pemeliharaan untuk per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	459.031.847	635.576.176	-27,78
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.257.500	28.601.901	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	707.752.772	542.128.064	30,55
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.263.922	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Persediaan suku cadang	0	0	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Pengembalian	0		-
Jumlah	1.206.306.041	1.206.306.141	0,00

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.702.747.
512,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.702.747.512,00 dan Rp1.360.238.065,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.471.447.112	1.202.995.065	105,44
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.600.000	60.481.000	99,40
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	23.938.400	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	86.762.000	96.762.000	-10,33
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah	2.702.747.512	1.360.238.065	98,70

*Beban
Barang untuk
diserahkan
kepada
masyarakat
Rp6.500.000,
00*

D.7 Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat adalah merupakan beban untuk mencatat Persediaan yang dimaksudkan untuk mendukung diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 dan Rp0,00. Beban ini ada karena adanya kesalahan penggunaan kode barang pada Modul Komitmen, dan akan dilakukan jurnal manual pada Semester II 2022.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp2.584.765.
322,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.584.765.322,00 dan Rp2.701.334.432,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.963.669.656	2.110.066.445	(7)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	612.322.308	577.172.101	6
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	-	5.497.500	(100)
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap yg tdk digunakan	2.596.054	2.421.017	7
Jumlah Penyusutan	2.578.588.018	2.695.157.063	(4)
Beban Amortisasi Software	6.177.304	6.177.369	(0)
Beban Amortisasi ATB Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	6.177.304	6.177.369	(0)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.584.765.322	2.701.334.432	(4)

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp108.001.1
38)*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	62	102	-39,22
Pendapat Pelepasan Aset Lancar	119.543.352		
Pendapat Pelepasan Aset Non Lancar		5.600.400	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	227.544.552		
Beban dari kegiatan Operasional Lainnya	0		0,00
Jumlah	-108.001.138	5.600.502	-2028,42

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Awal
Rp73.153.
964.408,0
0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp73.153964.408,00 dan Rp73.687.071.243.

Defisit LO
(Rp18.361.
762.778,0
0)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar (Rp18.361.762.778,00) dan (Rp18.014.393.371,00).

Transaksi
Antar
Entitas
Rp14.061.
709.775,0
0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.061.709.775,00 dan Rp15.890.160.241,00 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.821.025.048)
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.058.222.973
Transfer Masuk	824.511.850
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	14.061.709.775

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan keEntitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga per 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp(4.821.025.048),00 sedangkan DKEL sebesar Rp18.058.222.973,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal per 30 Juni 2022 sebesar Rp824.511.850,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Persediaan	Direktorat Jenderal Imigrasi	824.511..859
	Jumlah		824.511..859

Transfer Masuk online dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Dokumen Keimigrasian seperti Toner, E-KITAP, paspor, Voucher Visa.

Ekuitas

E.5 Ekuitas Akhir

Akhir

Rp68.853.

911.405,0

0

Nilai ekuitas akhir pada tanggal per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp68.853.911.405,00 dan Rp71.600.545.363,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- 1) Pada awal Tahun 2022 terdapat migrasi Saldo awal dari Aplikasi E-Rekon&LK ke Aplikasi berbasis web SAKTI pada Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP sehingga rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan penyusunan laporan Keuangan Semester I ta 2022 sudah menggunakan SAKTI dengan basis data *single entry*.
- 2) Pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang terdapat penyelesaian KDP sebesar Rp583.083.721,00 atas pekerjaan perluasan Gedung Kantor sesuai dengan BAST.
- 3) Pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sejumlah Rp10.244.580,00 atas Belanja Modal perangkat pengolah data berupa laptop dan PC Unit oleh Tuak Mandiri.
- 4) Terdapat jurnal manual untuk jurnal koreksi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang atas Beban yang masih harus dibayar sejumlah Rp49.646.000,00 karena pembayaran Belanja uang makan Periode Desember 2021 yang dibayar menggunakan DIPA Tahun 2022.
- 5) Terdapat Jurnal Koreksi pada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere atas Beban yang masih harus dibayar untuk Pembayaran tagihan air bulan Desember 2021 dengan DIPA 2022 sejumlah Rp354.500,00, pembayaran tagihan koran bulan Oktober - September 2021 sejumlah Rp210.000,00, pembayaran tagihan pengiriman surat periode Desember 2021 sejumlah Rp363.701,00.
- 6) Pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang terdapat Pendapatan dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp108.317.667,00 atas lelang 1 unit mobil minibus dan 7 unit Motor, dengan risalah lelang terlampir.

- 7) Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terdapat Pendapatan dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp11.225.685,00 atas 4 unit Motor, dengan risalah lelang terlampir.
- 8) Terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset pada Kantor Imigrasi Atambua sebesar Rp227.544.552,00 karena penghapusan bangunan gedung kantor permanen dengan rumah negara gol I type E di Napan sesuai dengan Kepmenkumham Nomor SEK-29.PB.05.05 TAHUN 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan karena sebab-sebab lain pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk Pembangunan PLBN.
- 9) Terdapat kesalahan penggunaan kode barang persediaan berupa Beban Pita Cukai, leges, materai pada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere Rp500.000, Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo Rp6.000.000 akan dilakukan koreksi pada Semester II 2022.
- 10) Terdapat kesalahan penggunaan akun pemeliharaan Bahan Baku sejumlah Rp22.945.100, Beban Persediaan Bahan Baku sejumlah Rp1.718.640,00 pada Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo dan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan akan dilakukan koreksi pada Semester II 2022.
- 11) Realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2022 Ditjen Imigrasi Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur senilai Rp225.413.975,00 atau 24,43 persen dari total anggaran Rp922.798.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

TABEL REALISASI BELANJA AKUN KHUSUS COVID-19

Menggunakan Akun Khusus COVID-19

No	Satker	Akun (Dalam 6 Digit)	Alokasi Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
1	Kantor Imigrasi	521131	Rp 253.853.000	Rp 107.953.000	42,53
		522192	Rp 113.912.000	Rp 1.936.000	1,70
2	Rudenim Kupang	521131	Rp 39.000.000	Rp -	0,00
		522192	Rp 136.128.000	Rp 26.382.000	19,38
3	Kantor Imigrasi Kelas III	521131	Rp 59.000.000	Rp 14.277.000	24,20
		521241	Rp 35.280.000	Rp 1.421.000	4,03
		522192	Rp 62.784.000	Rp 25.445.000	40,53
4	Kanim Kupang	521131	Rp 24.775.000	Rp 12.827.500	51,78
		522192	Rp 15.596.000	Rp 1.983.000	12,71
5	Divisi Imigrasi	521131	Rp 27.000.000	Rp 10.848.895	40,18
		522192	Rp 4.646.000	Rp 1.166.000	25,10
6	Kanim Maumere	521131	Rp 48.677.000	Rp 20.184.580	41,47
		522192	Rp 102.147.000	Rp 990.000	0,97
TOTAL			Rp 922.798.000	Rp 225.413.975	24,43